

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan : Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Farida Patitingi, et al, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Fikri Madoan, 2020, *Penjelasan Umum Mengenai Hakim dan Tugas dan Wewenangnya*, Jakarta: Setia Budi

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.



Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT CITRA ADITYA BAKTI, 2014

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan ke-I, Dunia Cerdas, Jakarta,

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media

Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Mahrus Ali, *Overcriminalization Teori, Dampak & Pencegahan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.

Michal Buchhandler-Raphael "Overcriminalization Speech", *Cardozo Law Review*, 2015.

Mulyoto, *Perjanjian Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta; Rajawali



Pers

Rusli Effendi dkk, *“Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional ”dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986.

Sandford H. Kadish, *“The Crisis of Overcriminalization”*, American Criminal Law, 1868.

Sarwono, 2009, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta, YBP-SP

Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

JURNAL

Afriana, A.Pangeran Mometa, Muhammad Aswan, 2022, *Pemberian Jasa Hukum Kenotariatan Dalam Pembuatan Ppjb Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Makassar*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol 1 No 8, 246-261

Andi Muhammad Asnan Yusfin, Ahmadi Miru, Marwah Marwah, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol 3 No 2, 225-244



Bahder Johan Nasution, 2020, *Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Notaris*, *Recital Review*, Vol. 2 No.1

Desi Indriani, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*, *Fiat Justisia* Vol 10 Issue 1

Doddy Radjasa Waluyo, 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001.

Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 1, (Maret 2017).

Evi Apita Maya, 2017, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, *Jurnal IUS*, Vol 5 No. 2

Felix The, 2017, "*Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris*", *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 46 No. 3

Hari Purwadi dan Adi Sulistiyono, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3



Heriyanti, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Autentik*", Yustisia. Vol 5 No. 2

I Wayan Paramarta Jaya, et.al. 2017. *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*, Rechtide, Vol. 12, No.2,

Muhaimin, 2020, Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2

Shabranah, A. N., Maskun, M., & Aswan, M. 2023. Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *UNNES Law Review*, 5(4), 3648-3657.

Teresia Din, 2019, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2

Wiriya Adhy Utama, dkk, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam pengadilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*", Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No 1

Tesis/Disertasi/Penelitian Ilmia

Anak Agung Intan Puspawati, 2018, *Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris*, Tesis, Universitas Pendidikan Nasional,



encapuri, dkk, "*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak*

Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang)

Dahli Marjon, 2018, *Penerapan Kode etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Muhammad Haris, 2017, "*Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

